

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola didefinisikan sebagai salah satu cara untuk memimpin dan membimbing organisasi secara terstruktur untuk mencapai tujuan. Tujuan dari tata kelola sendiri sebagai salah satu cara untuk mengawasi dan memberikan keamanan, keterbukaan, dan kepercayaan dalam organisasi demi pemangku kepentingan dan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik akan mendukung organisasi dalam mengembangkan sistem internal dan manajemen resiko. Dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.¹

Kemiskinan merupakan suatu fenomena dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang dialami oleh sebagian besar daerah di Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk pemenuhan kebutuhan setiap hari. Hal tersebut tentunya menyebabkan ketimpangan sosial dimana orang yang tidak dapat bersaing akan tersingkir dan masuk ke dalam lingkaran kemiskinan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah menerapkan paradigm baru Membangun dari Pinggiran yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian desa dalam pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan kesejahteraan dan kehidupan yang layak di desa, dan sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan.²

Berbicara tentang kemiskinan tentunya tidak terlepas dari kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dibutuhkan penanganan secara optimal dan terkoordinasi salah satunya dengan pembangunan. Menurut Conyers dan Hills, pembangunan juga diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahapan secara terencana dan berkesinambungan untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* diterapkan dengan tujuan untuk mencapai terwujudnya

¹ Elfrida Yuliana dan Natasia Alinsari, "Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa," *Jurnal Akuntansi* 6 (2022).

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

kesejahteraan manusia secara global. *Sustainable Development Goals* (SDGs) dibentuk saat pertemuan anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat yang dihadiri sebanyak 193 negara. Kepala negara yang hadir berkomitmen dan menyepakati untuk menghapus kemiskinan, menghilangkan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan dan mengurangi ketimpangan. Hal ini sudah ditetapkan dalam 4 pilar SDGs yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum dan pilar lingkungan.³

Indonesia yang menjadi salah satu negara yang menyepakati adanya SDGs dengan populasi muslim paling banyak didunia walaupun tidak termasuk dalam wilayah timur tengah, namun selalu mementingkan aspek keagamaan dan kenegaraan sebagai dua hal yang saling melengkapi dan saling berdampingan. Hal ini terlihat dari sila pertama dasar negara Indonesia yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang membuktikan kedalamannya pendirian pemerintah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari landasan agama dan etika moral kebangsaan.⁴

Agama merupakan salah satu institusi yang berpengaruh signifikan secara sosial, adanya nilai-nilai kemanusiaan, sikap, dan perilaku agama itu sendiri menjadi hal yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Hal ini menjelaskan secara rinci tentang metode dan perilaku manusia untuk melakukan bisnis. Agama juga tercermin sebagai salah satu kekuatan budaya terpenting yang dikandungnya. Bahkan mempengaruhi nilai-nilai kehidupan seseorang dalam perilaku konsumsinya. Agama sebagai salah satu unsur kebudayaan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan masyarakat dan kontribusinya ke berbagai komunitas keputusan pribadi, termasuk keputusan pembelian.⁵ Hal ini bisa terealisasi jika kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tidak ada kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Oleh karena itu, dalam agama islam telah diatur untuk menegakkan distribusi yang adil antara masyarakat, karena Allah sangat mengecam peredaran harta yang hanya

³ Ary Mustamiin Muadz, “Implementasi Kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Ciamis,” T.T.

⁴ Nida Humaida Dkk., “Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (*Sustainable Development Goals*) Dalam Perspektif Islam,” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, No. 1 (16 Juni 2020): 131, <https://doi.org/10.18592/Khazanah.V18i1.3483>.

⁵ Zuhdan Ady Fataron, “Elaborasi Green Marketing dan Islamic Marketing Ethics (Studi Kasus UMKM di Indonesia),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (25 Februari 2022): 80, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4250>.

terkonsentrasi disegelintir orang saja.⁶ Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Hasyr (59):7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Artinya: “Harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul padamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka, tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”⁷

Kemiskinan yaitu kondisi yang dialami suatu kelompok yang tidak dapat mengupayakan kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengangguran tidak hanya satu-satunya faktor penyebab kemiskinan pada negara berkembang, ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan dinegara berkembang diantaranya kualitas sumber daya manusia yang tergolong rendah, kurangnya pemberdayaan masyarakat, kurangnya pengembangan potensi alam, rendahnya kualitas pendidikan, dan minimnya kualitas hidup masyarakat.⁸ Kemiskinan dapat dihapuskan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat teratasi jika penduduk masih diikat oleh kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan program pengembangan sumber daya manusia untuk mengurangi dan menghapuskan kemiskinan.⁹

Dalam hal ini kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan perubahan dari semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Pemerintah juga berusaha untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan

⁶ Ika Yunia Fauzia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2014) :140

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*: 797

⁸ Nurcholis Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. (Jakarta:Erlangga: 2011):4

⁹ Effendi, Noer Tajjudin. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. (Yogyakarta:Tiara Wacana:1995):249-252

pembangunan di Indonesia. Diperjelas dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan yaitu, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari sekian banyak program pemerintah terdapat satu usaha yang sudah dilaksanakan dan dikembangkan karena dinilai memberi banyak manfaat untuk masyarakat yaitu program desa binaan.

Menurut James Midgley mengidentifikasi kesejahteraan sosial sebagai kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama yaitu: jika masalah sosial dapat dikelola dengan baik, kebutuhan terpenuhi dan peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal. Kesejahteraan masyarakat ini diawali pada unit terkecil yaitu kesejahteraan keluarga, meliputi kesejahteraan sandang, pangan, dan papan yang menjadikan kewajiban utama yang harus dicukupi sehari-hari. Pengutamaan kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok kurang beruntung, khususnya keluarga miskin yang diupayakan untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak.¹⁰

Indikasi adanya kemajuan dapat dilihat dari meningkatnya taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Untuk gambaran paling sederhananya dengan melihat apakah perubahan tersebut dapat berdampak pada semakin banyak terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Semakin terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka semakin meningkat indikasi kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat.¹¹

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial”.¹²

Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan berbagai bentuk upaya yang terencana meliputi bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial, untuk memenuhi kebutuhan manusia, mengatasi dan mencegah masalah sosial dan memperkuat lembaga lembaga sosial. Dari pengertian tersebut mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial

¹⁰ Huda Miftachul. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. (Yogyakarta:Pustaka Belajar:2009) :72

¹¹ Huda Miftachul. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta:Pustaka Belajar:2009) :37

¹² UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

adalah suatu lembaga atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang dilakukan dengan baik oleh pemerintah ataupun swasta dengan tujuan untuk mencegah dan mengatasi atau memberi kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.¹³

Pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan desa diukur berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Upaya mendalam terwujudnya desa mandiri dan desa maju merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan desa. Indeks Desa Membangun mendukung pencapaian tujuan pembangunan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu pengurangan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri. Paradigma yang digunakan saat ini adalah pembangunan pinggiran yang ada di Indonesia, pemerintah fokus pada pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Nida Humaida, dkk melakukan penelitian pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dalam perspektif islam. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa konsep islam searah atau berkelanjutan dengan tujuan SDGs, dengan cara memerangi kemiskinan dengan cara zakat, puasa, dan pola hidup yang sederhana, mengelola lingkungan secara bijak dan menjaga keseimbangan alam.¹⁵

N. Oneng, dkk melakukan penelitian dengan studi analisis masalah dalam *millennium development goals*. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa *millennium development goals* memiliki nilai-nilai masalah yang memiliki peran terhadap *maqasid al-shariah* yaitu terpeliharanya agama, akal, jiwa, keturunan, harta, dan nasab.¹⁶

Elfrida Yuliana dan Natasia Alinsari, melakukan penelitian dengan studi penerapan tata kelola badan usaha milik desa dalam mewujudkan *sustainable development goals*. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola BUMDes diterapkan

¹³ Andi Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung:Pt Refika Aditama:2012)

¹⁴ "Burhanuddin Mukti, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pati 2020-2021* (Pati: Cv. Yudhapaty 2021)".

¹⁵ Nida Humaida Dkk., "Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, No. 1 (16 Juni 2020): 131, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>.

¹⁶ N. Oneng Nurul Bariyah Dan Siti Rohmah, "Analisis Masalah Dalam Millennium Development Goals," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, No. 2 (30 Juni 2013): 141, <https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V13i2.141-162>.

dengan benar. Sehingga ekonomi desa mengalami pertumbuhan yang merata dari dampak salah satu program SDGs Desa.¹⁷

Landy, dkk melakukan penelitian dengan studi *SDGs and Islamic Studies: Fiqh Muamalat, Sustainable Development, and Maqashid Asy- Syariah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fiqh sebagai disiplin ilmu memiliki dimensi yang berorientasi ke depan dengan bukti empiris, selain itu, SDGs diusulkan sebagai tema dalam kepentingan manusia untuk mengukur tingkat pencapaian Maqashid Syariah di era kontemporer.¹⁸

Faturachman dan Phradiansah melakukan penelitian dengan studi tinjauan implementasi pembangunan berkelanjutan: sampah kota kendari. Temuan dalam penelitian ini cukup baik pada aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun ada kendala dalam aspek implementasi kebijakan.¹⁹

Sri Endang Rahayu, dkk melakukan penelitian dengan studi menekan angka kesenjangan sosial di Indonesia melalui sustainable development goals perspektif ekonomi islam. Hasil dari penelitian ini memberi rekomendasi kepada masyarakat dan pemerintah agar memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam yaitu kepemilikan hanya milik Allah, kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya, dan keseimbangan.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menyimpulkan bahwa adanya pembangunan berkelanjutan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun masih terdapat hambatan dalam implementasi dari kebijakan yang diberikan. Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin membuktikan bahwa implementasi tata kelola pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bisa memberikan kebijakan yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.

¹⁷ Yuliana dan Alinsari, "Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa."

¹⁸ Landy Trisna Abdurrahman dkk., "SDGs and Islamic Studies: Fiqh Muamalat, Sustainable Development, and Maqashid Asy-Syari'ah," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 2 (22 September 2022): 175, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i2.2583>.

¹⁹ Faturachman Alputra Sudirman dan Phradiansah Phradiansah, "Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari," *Jurnal Sosial Politik* 5, no. 2 (4 Desember 2019): 291, <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9821>.

²⁰ Abdurrahman Hakim, "Menekan Angka Kesenjangan Sosial di Indonesia melalui Sustainable Development Goals Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (29 Oktober 2020): 179, <https://doi.org/10.29300/ba.v5i2.3365>.

Di Kabupaten Pati, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik merupakan salah satu tantangan pembangunan sebagaimana yang telah tercantum dalam visi pembangunan Kabupaten Pati dengan mewujudkan amanat undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Pasal 28 yang menyebutkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan pekerjaan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Melihat latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pati. Sehingga peneliti membuat judul penelitian **“Implementasi Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pati”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memuat rincian tentang pernyataan cakupan topik pokok yang diungkap dalam penelitian. Berdasarkan judul, maka penelitian ini berfokus pada implementasi tata kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana implementasi tata kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati ?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata kelola yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) dalam

mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kabupaten Pati.

2. Untuk mengetahui penerapan tata kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan memperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan, terutama dalam hal pengembangan keilmuan dan praktik. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberi sumbangan berupa pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan implementasi tata kelola DISPERMADES dalam mewujudkan SDGs dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Memberikan bukti empiris terkait kebenaran teori-teori tentang implementasi tata kelola DISPERMADES yang dalam penelitian ini dikaitkan dengan terwujudnya SDGs dan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademik IAIN Kudus, penelitian ini diharapkan dapat menambah literature serta referensi yang dapat digunakan sebagai bahan informasi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan yang serupa.
- b. Bagi pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk kebijakan pengambilan keputusan di masa yang akan datang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tercapainya penerapan tata kelola dalam pembangunan berkelanjutan yang sesuai dalam SDGs di Kabupaten Pati.
- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan melihat , mengamati dan mengetahui keadaan yang sebenarnya yang dihadapi. Mampu mengembangkan wacana pemikiran dalam menerapkan teori khususnya terkait dengan implementasi tata kelola

DISPERMADES dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan poin-poin SDGs.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini disusun bertujuan untuk memperoleh pandangan secara garis besar terkait bagian-bagian yang saling berkaitan yang nantinya diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun :

1. Bagian Awal

Bagian awal, berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, serta *abstrak*.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari lima bab, adanya keterkaitan dari bab satu dengan yang lain dan saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, adapun lima bab tersebut adalah :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini adalah bagian pendahuluan yang berisi dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang mencakup tentang teori yang berkaitan tentang judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi tata kelola DISPERMADES dalam upaya mewujudkan SDGs dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.

BAB V : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, beserta saran yang ditunjukkan kepada obyek penelitian atau penelitian selanjutnya.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penulisan skripsi, daftar riwayat pendidikan penulis, dan lampiran-lampiran.

